Bulaksumur Pos
Media Komunitas Universitas Gadjah Mada

Ilus: Metta/ Bul

Kebijakan Nomenklatur UKM Digantung Tanpa Kejelasan

Oleh: Ayu Astuti/ Hafidz Wahyu M

Nomenklatur demi kerampingan struktur menjadi isu panas bagi sebagian UKM beberapa waktu terakhir. Penolakan muncul dari gelanggang, audiensi diusahakan namun jawaban yang melegakan tak kunjung datang.

Wacana pemberlakuan nomenklatur alias "penggabungan" beberapa UKM tampaknya akan segera terealisasi tahun ini. Hal ini jelas terlihat dengan diadakannya sosialisasi singkat antara Direktur Kemahasiswaan dan perwakilan UKM pada Kamis (21/1) lalu.

Masih proses

Dalam sosialisasi tersebut, Dr Drs Senawi M P selaku Direktur Kemahasiswaan mengatakan bahwa nomenklatur sudah sampai pada tahap semifinal. "Surat Keterangan (SK) belum, tetapi setidak-tidaknya ini, *lho,* arah kita ke sana (nomenklatur,*-Red*). Menurut Senawi, wacana mengenai nomenklatur pun sudah lama dilemparkan.

Sidik Purnomo selaku Kepala Sub Dit. Kelembagaan dan Kegiatan Mahasiswa membenarkan adanya kebijakan tersebut. " Ya, memang benar akan diberlakukan kebijakan nomenklatur UKM yang kami anggap sejenis dan memiliki kegiatan yang hampir sama. Namun hal ini masih dalam proses, kedepannya nanti bisa dibicarakan dengan pak Direktur (Senawi,- *Red*)," ungkap Sidik ketika ditemui di kantornya Senin, (22/2) lalu.

Agaknya isu ini ditolak secara tegas oleh UKM-UKM terkait. Fauzi (Elektronika dan Instrumentasi '14), ketua UKM Merpati Putih mengatakan bahwa dirinya secara pribadi sangat menolak adanya nomenklatur ini. Menurutnya, rekan-rekan sesama Merpati Putih dan UKM yang tergabung dalam Pencak Silat juga sepakat menolak." Kami berbeda secara sistematika, kurikulum, teknik, serta memiliki ciri khas yang berbeda," ungkapnya.

Penolakan juga diungkapkan oleh ketua Unit Penalaran Ilmiah (UPI), Syahrul (Elektronika dan Instrumentasi '14). Syahrul kecewa karena hingga kini belum ada kepastian dari Dirmawa. "Dari Januari hingga sekarang pak Direktur susah ditemui dan kami belum mendapat kepastian tentang hal ini. Kami berharap pihak Dirmawa segera mengadakan audiensi dengan kami untuk mencari solusi bersama", jelasnya

Namun, pihak Dirmawa membantah hal tersebut. Menurut Sidik, Dirmawa membuka diri jika mahasiswa menginginkan audiensi. "Oh tidak, Pak Direktur sangat *welcome* kalau mau mengadakan audiensi. Asalkan cukup perwakilan tiap UKM saja. Kemarin juga teman-teman dari FORKOM (Forum Komunikasi UKM) sudah kesini. Mungkin nanti bisa *ditanyain*," tutur Sidik.

Tak semua tahu

Sementara itu, isu ini tampaknya belum banyak diketahui oleh mahasiswa, bahkan sesama pegiat UKM ."Saya baru tahu hal ini, tapi kalau begitu saya sendiri tidak setuju. Setiap UKM kan punya kurikulumnya masing – masing. Masa hanya karena dianggap tumpang - tindih pihak atas lantas terkesan memaksakan UKM terkait, " pungkas Caesar, Kepala Kaderisasi Jamaah Shalahudin.

Linda Fitria, (Antropologi '15) yang juga tergabung dalam unit MAPAGAMA juga mengaku baru mendengar hal ini. Sepakat dengan Caesar, Linda juga berpendapat bahwa penggabungan lebih tepat pada pemanfaatan fasilitas bersama saja, bukan pada UKM nya. " Sekrenya bisa digabung seuai dengan klasternya yang sejenis, *lagian* dengan banyaknya UKM yang ada di UGM, saya rasa hal itu jadi nilai plus untuk UGM," jelasnya.

Sidik menambahkan bahwa nomenklatur ini bukan bermaksud untuk menghilangkan suatu UKM. Kepengurusan dari UKM yang dianggap sejenis berada dalam satu payung sehingga lebih tertata dan tidak terjadi *overload*. " Kami hanya ingin menata, masalah kegiatan silahkan berjalan seperti biasa nantinya. Tidak ada yang akan dirubah, " jelasnya lagi.

DARI KANDANG B21

Merutinkan Keakraban

Liburan semester ganjil telah dua minggu lebih bergulir. Tiba saatnya bagi para mahasiswa untuk menjerat diri dalam hiruk-pikuk rutinitas perkuliahan. Terkhusus bagi seluruh awak aktif SKM UGM Bulaksumur, terselip sebuah agenda wajib yang menginterupsi akhir pekan kami. Bukan sekadar rutinitas berupa rapat tema, melainkan malam keakraban berkedok acara bertajuk kekinian. Naluri awak magang dalam bidang jurnalistik pun diasah melalui simulasi terbitan dalam waktu semalam. Amunisi perang awak magang juga diisi kembali melalui obrolan-obrolan bermanfaat yang menghadirkan para alumni. Sementara awak yang sudah lebih senior mengakrabkan diri dengan obrolan-obrolan yang lebih intim dan dewasa. Obrolan-obrolan mengenai masa depan yang tak jauh-jauh dari tujuan untuk merutinkan keakraban. Menggalakan kembali budaya kumpul-kumpul agar isi kepala menjadi tak tumpul.

Perihal keakraban pun sedikit banyak dibicarakan dalam Bulaksumur Pos edisi 238. Setelah dengan setia menunggu para awak kembali masuk kuliah, kami berupaya kembali mengakrabkan diri dengan pembaca. Isu-isu yang dekat dengan civitas akademika pun coba kami angkat. Sebut saja persoalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang akan dijalani oleh mahasiswa angkatan 2013 sebagai penganut Uang Kuliah Tunggal (UKT) perdana.

Ada pula isu nomenklatur yang mengusik sebagian rekan-rekan sesama pegiat Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Pembahasan mengenai nomenklatur bahkan tak mengenal hari libur. Seperti halnya keakraban yang tak bisa seenaknya dipaksakan, nomenklatur alias "penggabungan" tentu tak bisa terjalin secara instan. Pertemuan-pertemuan perlu dirutinkan demi memperjelas segala kesimpangsiuran. Jika memang demi kebaikan di masa mendatang, sudah layak dan sepantasnya apabila nomenklatur dipersiapkan secara lebih matang.

Akhir kata, selamat menikmati sajian perdana Bulaksumur Pos di semester ini. Mudah-mudahan edisi 238 dan edisi-edisi selanjutnya mampu menjadi bagian dari rutinitas rekan-rekan pembaca sekalian.

Penjaga Kandang

TAJUK

Foto: Desy/ Bul

KKN Perdana Penganut UKT

Permasalahan terkait kebijakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang tiap tahun berubah seolah tidak ada habisnya. KKN selalu menjadi bahasan rutin nan hangat di kalangan mahasiswa, khususnya bagi mereka yang melaksanakan. Terlebih KKN 2016 ini mayoritas diikuti oleh angkatan 2013 selaku mahasiswa yang pertama kali melaksanakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kali ini, masalah dana KKN menjadi perdebatan yang cukup sengit antara pihak universitas dan mahasiswa. Pihak universitas mulanya menghendaki mahasiswa untuk membayar sejumlah uang. Uang ini nantinya akan dikembalikan lagi ke mahasiswa dalam bentuk biaya hidup serta atribut seperti kaos, topi, dan lain sebagainya. Ditambah lagi, nominal biaya KKN yang diminta mengalami lonjakan yang cukup besar dibandingkan tahun 2015 lalu. Hal ini tentu saja membuat banyak mahasiswa keberatan dengan kebijakan tersebut. Logikanya, dengan sistem UKT berarti sudah tidak ada pungutan lain diluar biaya UKT, sehingga untuk KKN mahasiswa tidak perlu membayar lagi.

Dari hasil diskusi yang sempat digelar pihak rektorat bersama mahasiswa, diputuskan bahwa mahasiswa tidak dipungut biaya KKN untuk tahun 2016 ini. Dengan kata lain, biaya hidup, transportasi, cek kesehatan, dan sebagainya ditanggung oleh mahasiswa sendiri sesuai kesepakatan kelompok.

Mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dalam mempersiapkan segala keperluan KKN tahun ini. Sementara UGM bisa dikatakan tak mau lagi terlalu ambil pusing atas pengelolaan biaya hidup di lokasi. Kekhawatiran lebih-lebih dirasakan oleh mahasiswa yang berniat KKN di luar pulau Jawa dengan biaya hidup relatif tinggi. Tak hanya soal biaya hidup, kemandirian juga berimbas pada penerimaan asuransi. Apabila pada mulanya universitas mengakomodir, mahasiswa kini harus mengupayakan sendiri.

KKN merupakan program wajib dari universitas. Mahasiswa mengabdi pada masyarakat dengan membawa nama UGM. Lantas, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan mahasiswa di lokasi? Bukankah sudah sepantasnya universitas mendukung penuh program ini?

Tim Redaksi

Penerbit: SKM UGM Bulaksumur **Pelindung:** Prof Ir Dwikorita Karnawati Msc, PhD, Dr Drs Senawi MP **Pembina:** Dr Phil Ana Nadhya Abrar MES **Pemimpin Umum:** Candra Kirana Mustahziyin **Sekretaris Umum:** Delfi Rismayeti **Pemimpin Redaksi:** Bernadeta Diana SR **Sekretaris Redaksi:** Rosyita A **Editor**:Alifah F, Anisah ZA, Nadhifa IZR **Editor:** Fitria CF **Redaktur Pelaksana**: Melati M , Nur MU, Yovita IFK, Mahda 'A, Fitri YR , MA Alif **Reporter**: Hesti W, Adila SK, Floriberta NDS, Nadia FA, Gadis IP, Rovadita A, F Yeni ES, Boston B, Dzikri SA, Willy A, Alifaturrohmah, Nurul MTW, Elvan ABS, Fiahsani T, Riski A, Feda VA, Indah FR, Ayu A, Hafidz WM, Merara AM, Nala M **Kepala Litbang**: Dandy Idwal Muad **Sekretaris Litbang**: Mutia F **Staf Litbang**: S Kinanthi, Dyah P, Riza AS, Richardus A, Densy S, Andi S, Raka P, M Ghani Y, Utami A, Kartika N, Rohmah A, Shifa AA, M Budi U **Manager Iklan dan Promosi**: Doni Suprapto **Sekretaris Iklan dan Promosi**: Nizza NZ **Staf Iklan dan Promosi**: Fahrizan AN, Rosa L, Herning M, Ahmad MT, Rahardian GP, Elvani AY **Kepala Produksi**: M Ikhsan Kurniawan **Sekretaris Produksi**: Anggia R **Korsubdiv Fotografer**: Desy Dwi R **Anggota**: A Perwita S, M Ilham AP, M Syahrul R, Fadhilaturrohmi, Hasti DO, Yahya FI, Devi A **Korsubdiv Layouter**: Intan R **Anggota**: M Yusuf I, Tongki AW, M Fachri A, Rifqi A, Faisal A, M Anshori, Sandy B **Korsubdiv Ilustrator**: Nariswari An-Nisa H **Anggota:** Fatma RA, Mia AN, Dhimas LG, Radityo M, Meli S **Korsubdiv Web Designer**: M Afif F**Anggota**: Rifki Fauzi , M Rodinal KK, Ricky Afdita AP **Magang**: Gawang WK, Rizka KH, Aify ZK, Ami D, Anggun DP, Aninda NH, Arina N, Ayu A, Bening AAW, Dimas P, Fadilah H, Ferninda B, Fety HU, Fuad CD, Hadafi FR, Hasbuna DS, Ilham MAS, Ilham RFS, Keval DH, Khrisna AW, Ledy KS, LilwSSin E, M Farhan I, M Seftian, Nurul C, Rahma A, Risa FK, Rosyida A, Tuhrotul F, Ulfah H, Vera P, Yusril IA, Zakaria S, Faqih R, Hanum N, Surya A, Widi RW, Naya A, Fanggi MFNA, Putri A, Qurrotul N, Irfan A, Titi M, Devina PK, Lailatul M, M Rakha R, Maya PS, Karinka IR, Sanela AF, Romy D, Derly SN, Rojiyah LG, Anas AH, Rahayu SH, Pambudiaji TU, Ridwan AN, Kevin RSP, Nugroho QT, Arif WW, Delta MBS, M Alzaki T, Nabila N, Marwa HP, Afifah NH, Dewinta AS, F Sina M, Neraca CIMD, NS Ika P, Tio RP, Vidya MM, Windah DN, A Syahrial S, Alfi KP, Hilda R, M Hafidzuddin T, Rheza AW, JF Juno R, N Fachrul R, Muadz AP

Alamat Redaksi, **Iklan dan Promosi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281. **Telp**: 081215022959. **Email**: info@bulaksumurugm.com. **Homepage**: www.bulaksumurugm.com. **Twitter**: @skmugmbul.

Foto: Delta/ Bul

Melukis Cinta Hingga Senja Menua

Oleh: Widi Rahma W/ Mutia F

Judul	: Jodoh
Penulis	: Fahd Pahdepie
ISBN	: 978-602-291-118-0
Penerbit	: Bentang Pustaka
Cetakan Pertama	: Desember 2015
Jumlah halaman	: xi + 245

Jodoh adalah novel Fahd Pahdepi yang membawa pembaca ikut menyusuri lorong kisah Sena dan Keara dalam menjamah cinta yang mereka yakini sebagai jalan takdir Tuhan di masa depan.

Fahd Pahdepi, pria kelahiran tanah Cirebon, 22 Agustus 1986 merupakan penulis sekaligus pembicara publik yang banyak menyabet penghargaan bergengsi. Diantaranya, UNICEF *Young Writer Award* dan *DAR!Mizan Unlimited Creativity Award 2006* sebagai penulis terbaik. Ia juga pernah menduduki kursi nominator dalam Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa Bidang Kreatif Tahun 2009 yang diselenggarakan Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional RI. Baginya, hidup adalah tentang merayakan peristiwa kebetulan, menyiasati takdir, dan menyusuri nasib. Setelah sukses dengan novelnya "Rumah Tangga", kini Fahd hadir dengan merilis novel "Jodoh" yang mampu memengaruhi pembaca sehingga seolah-olah turut menjadi karakter utama di dalamnya.

Tulisan Fahd Pahdepi berkisah tentang Sena dan Keara yang saling mengenal sejak usia 6 tahun, tepatnya ketika duduk di bangku SD. Berawal dari tatapan di hari pertama sekolah dasar, Sena mulai menambatkan hati pada Keara. Di sela ketidakwajaran yang terjadi di antara keduanya membuat Sena semakin yakin bahwa dirinya memang lebih dewasa dari usia sebenarnya. Namun di sisi lain, Keara merasa belum siap untuk menerima dan mendengar olok-olok dari teman seusianya karena merasa masih terlalu dini. Hal tersebut membuat Sena merasa sakit hati, ditambah lagi Keara memanggilnya dengan sebutan "Virus". Cerita yang cukup konyol namun menarik untuk dibubuhkan sehingga memberi kesan tersendiri pada novel ini.

Ternyata waktu memiliki rencananya sendiri. Meski keduanya buta akan kepribadian masing-masing, Sena dan Keara kembali dipertemukan di jenjang pendidikan selanjutnya. Keadaan asrama justru semakin menumbuhkan bunga cinta di antara mereka berdua. Fahd melukiskan kisah romansa mereka dengan sentuhan-sentuhan fenomena zaman dulu, yang menunjukkan dua insan hanya mampu menjamah cinta lewat surat, namun justru cara itulah yang membuat keduanya yakin tentang jalan yang ditakdirkan Tuhan di masa depan. Cara-cara Fahd menggambarkan cinta di antara Sena dan Keara dalam bentuk yang cukup klasik seolah membawa pembaca ikut dalam arus masa lampau, jauh sebelum modernisasi. Novel Jodoh dikemas apik dengan balutan puisi-puisi romansa karya Sapardi Djoko Damono yang menciptakan estetika tersendiri sehingga terkesan lebih manis dan hidup.

Ketika ruang dan waktu masih mengijinkan keduanya untuk bermain-main dengan cinta, Sena dan Keara pun harus berpisah. Mereka memutuskan kuliah di kota yang berbeda. Namun tak lantas perpisahan yang terjadi membuat cinta mereka mencair. Bandung dan Jogja. Pembaca seakan dibuat bertanya apakah keduanya mampu untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan jarak ini. Hal ini menjadi siasat yang baik untuk menarik minat baca. Selain itu, sudut pandang orang pertama yang digunakan dan penggunaan diksi yang tepat sekaligus tidak berbelit menjadikan pembaca seolah ikut menyusuri lorong kisah Sena dan Keara dalam menjamah cinta yang mereka yakini. Namun sayang, novel ini dituangkan dalam alur campuran yang lebih mendominasi. Sebenarnya hal ini cukup menarik, namun membuat pembaca harus memperkuat imajinasi dan kerap kali membingungkan, sehingga butuh konsentrasi penuh dalam memahami.

Perubahan Kebijakan KKN, Mahasiswa Dilarang Menuntut?

Oleh: Rosyda Amalia, Keval Diovanza, Vera Permataningtyas/ Floriberta Novia

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semakin dekat. Namun, kebijakan mengenai prosedur KKN yang mengalami perubahan pada tahun ini masih meninggalkan banyak pertanyaan.

Berbicara mengenai KKN seakan tidak ada habisnya. Apalagi, mulai tahun ini kebijakan prosedural KKN mengalami perubahan. Pembayaran biaya KKN yang dibarengi dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa angkatan 2013 menimbulkan pergolakan yang cukup panas.

Negosiasi biaya lokasi KKN

UGM sejatinya mempermudah setiap mahasiswa peserta KKN dalam mengurus beragam keperluan baik sebelum maupun selama KKN berlangsung. Mulai dari negosiasi harga lokasi KKN, asuransi kesehatan, cek kesehatan, hingga atribut, idealnya dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM). Mahasiswa cukup membayar biaya KKN dan mengikuti seluruh prosedur yang ada.

Terkait pelaksanaan KKN 2016, mahasiswa dihadapkan pada sebuah dilema. Peserta KKN diminta untuk membayar biaya hidup seperti tahun-tahun sebelumnya. Padahal, mayoritas peserta KKN tahun ini juga dibebani dengan biaya UKT. Keberatan mahasiswa lantas disampaikan ke rektorat dan mendapat tanggapan. Hasilnya, mahasiswa dipersilakan tidak membayar biaya KKN, tetapi dengan konsekuensi seluruh proses administrasi harus diurus secara mandiri. "Sebetulnya kami hanya mengelola. Tapi *toh* kalau itu juga tidak sesuai dengan keinginan mahasiswa, seperti yang sudah diakomodasi oleh bu rektor, ya sekarang mandiri saja," tutur Djaka Marwasta Kepala Subdirektorat KKN UGM.

Menurut Djaka, mahalnya biaya hidup di lokasi KKN merupakan permasalahan yang kerap terjadi. Jika tahun lalu LPPM turut bernegosiasi untuk menurunkan harga biaya tempat tinggal, tidak demikian dengan KKN tahun ini. Pengelolaan yang biasa diserahkan kepada LPPM kini diambil alih oleh mahasiswa. "Karena sekarang mahasiswa meminta mandiri, ya silakan bernegosiasi sendiri dengan tuan rumah. Namun, kalau sudah disepakati lokasi KKN-nya, tapi tidak ada kesepakatan harga, lebih baik jangan ke sana," ungkapnya.

Sebenarnya yang kita tuntut adalah biaya hidup. Kenapa harus bayar lagi padahal semuanya sudah termasuk dalam UKT?

- Ruru (Sastra Nusantara '13)

Ilus: Cinta/ Bul

Jaminan asuransi kesehatan

Kesanggupan mahasiswa untuk mempersiapkan KKN secara lebih mandiri membuat pihak universitas tidak lagi menyediakan asuransi bagi mahasiswa secara keseluruhan. UGM hanya akan menyediakan dana santunan kematian.

Selain asuransi, pemeriksaan kesehatan pun dilakukan secara mandiri. Mahasiswa cukup mengumpulkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang. Hal semacam ini dipandang rawan kekeliruan dan pemalsuan. "Padahal sudah jelas bahwa tanggung-jawab kekeliruan data ada di mahasiswa, sehingga kalau misalnya mahasiswa minta asuransi, maka pihak asuransi tidak bisa ikut memberikan klaim," jelas Djaka.

Selain itu, menurut mahasiswa peserta KKN, khususnya angkatan 2013, apa yang sudah dilakukan universitas sebenarnya sudah mempermudah segala mekanisme mengenai KKN. Termasuk persoalan mengenai asuransi dan cek kesehatan. Meski begitu, sebagian besar mahasiswa mengaku keberatan jika disuruh membayar lagi. "Sebenarnya yang kita tuntut adalah biaya hidup. Kenapa harus bayar lagi padahal semuanya sudah termasuk di dalam UKT?," protes Ruru (Sastra Nusantara'13). Senada dengan Ruru, Lia Irawati (Gizkes'13) juga menyatakan keberatan jika harus membayar untuk biaya hidup selama KKN. Menurutnya, biaya hidup selama KKN sudah termasuk di dalam UKT. "Keberatan sih iya, apalagi kalau bayarnya barengan sama bayar UKT," ujarnya.

Berbeda dengan Ruru dan Lia, Yeye (Bahasa Korea'12), tampak tak keberatan bila harus membayar. Menurutnya, hal ini dapat mempermudah administrasi mahasiswa. "Memang, sih, bayar tapi dengan begitu kita jadi *nggak* repot karena semuanya sudah *diurusin* universitas," pungkasnya.

Menilik Peran Mahasiswa dalam Kebijakan KKN

Oleh: M Seftian, Tuhrotul Fu'adah, Risa Kartiana/ Nala Mazia

Reaksi mahasiswa terhadap perubahan kebijakan KKN 2016 dihimpun dalam diskusi bersama pihak kampus. Meski beberapa mahasiswa memutuskan untuk aktif memperjuangkan kebijakan yang pantas, namun ada pula mahasiswa yang sekadar mengikuti arus.

KKN-PPM UGM 2016 terjadwal dilaksanakan bulan Juni mendatang. Membincang persiapan pelaksanaannya, kebijakan mengenai lonjakan biaya mendapat sorotan lebih hingga mahasiswa berperan mengambil alih.

Mahasiswa beraliansi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai badan UGM yang bertanggungjawab atas pelaksanaan KKN mewajibkan setiap mahasiswa calon peserta KKN membayar dua juta rupiah sebagai biaya operasional. Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan biaya KKN tahun lalu yang dipatok sebesar satu juta lima puluh ribu rupiah.

"Agak miris saat mahasiswa disuruh mengabdi tetapi tidak gratis, malah dibebankan untuk membayar," kata Muhammad Retas, mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah Kota 2013.

Menjadi masalah di sini adalah, mayoritas mahasiswa calon peserta KKN tahun ini merupakan mahasiswa angkatan 2013 yang dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Menurut Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tertera dalam Pasal 1 butir 5, *Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional mahasiswa per semester dan program studi di PTN*. Selanjutnya, Pasal 8 menyatakan, *PTN dilarang memungut uang pangkal dan/ atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Diploma*.

Menyadari hal tersebut, sejumlah mahasiswa bereaksi keras dengan membentuk gerakan aliansi mahasiswa 2013. Gerakan ini bertujuan menyampaikan aspirasi mahasiswa, khususnya hak mahasiswa yang akan menjalani KKN pada 2016. Retas, selaku penggagas aliansi ini, yang juga merupakan ketua BEM Teknik, mengatakan bahwa pihak UGM masih melayani diskusi dengan mahasiswa, meskipun hasilnya kurang pas di mata mahasiswa.

"Namun, di sisi lain, hal itu lebih baik daripada kampus-kampus lainnya yang memberikan kebijakan langsung tanpa adanya diskusi," tambahnya.

Mengenai kebijakan kenaikan biaya KKN 2016, sempat digelar beberapa kali diskusi dan *hearing* kepada aliansi mahasiswa KKN 2013. Diskusi yang menghadirkan pihak rektorat termasuk LPPM ini pada akhirnya berhasil menghapuskan biaya KKN dari pelaksanaan KKN-PPM UGM 2016.

> "Saya merasa kecewa karena mahasiswa selain aktivis hanya manut mengikuti alur yang ada. Seharusnya, semakin banyak mahasiswa yang bicara, semakin kuat peran mahasiswa untuk ikut membentuk kebijakan.
>
> **- Muhammad Bayhaqi Irwansyah (Teknik Industri '13)**

Sikap pasif mahasiswa

Meskipun sejumlah mahasiswa gigih memperjuangkan kebijakan KKN, ada saja mahasiswa lainnya terkesan tenang mengikuti arus. Tidak bersuara, tidak mengkritisi, bahkan beberapa tidak peduli.

Salah satunya adalah MA, mahasiswa Farmasi 2013. MA tidak terlalu mempermasalahkan kebijakan KKN 2016. Menurutnya, respon mahasiswa terhadap kebijakan KKN 2016 tergantung kepada mahasiswa yang bersangkutan. Kebijakan tentang biaya KKN pun MA rasa tidak akan merisaukan, karena menurutnya hal itu wajar. Oleh karenanya, ia cenderung pasif dan hanya mengikuti arus.

"Tapi, kalau bagi sebagian besar mahasiswa kebijakan finansial memang memberatkan, dan mereka melakukan aksi, saya *sih* dukung-dukung saja," ujarnya

Muhammad Bayhaqi Irwansyah, mahasiswa jurusan Teknik Industri 2013 yang merupakan bagian dari aliansi mahasiswa yang memperjuangkan kebijakan KKN 2016 menyatakan kekecewaannya terhadap sikap mahasiswa yang acuh tak acuh. "Saya merasa kecewa karena mahasiswa selain aktivis hanya *manut* mengikuti alur yang ada. Seharusnya, semakin banyak mahasiswa yang bicara, semakin kuat peran mahasiswa untuk ikut membentuk kebijakan," pungkasnya.
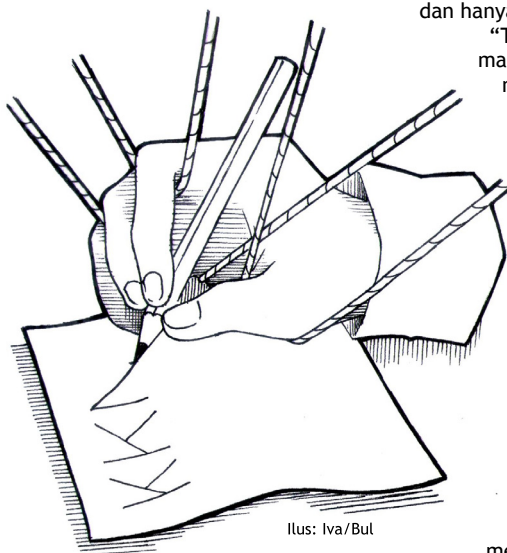
Ilus: Iva/Bul

Topeng Batik Desa Bobung: Kerajinan dan Penghidupan

Oleh: Hadafi Farisa R, Krishna Aji W/ Riski Amelia

Foto: Bowo/ Bul

Yogyakarta kota pariwisata. Tak hanya wisata alam, Yogya juga mengunggulkan wisata budaya yang menjelma dalam rupa kerajinan-kerajinan khas daerah. Seperti kerajinan topeng batik, satu di antara beragam hasil karya warga Yogya yang membuat wisawatan tertarik.

Terinspirasi pelanggan

Topeng batik merupakan produk kerajinan yang berasal dari Desa Wisata Bobung, sebuah sentra kerajinan topeng batik yang terletak di sebelah timur kota Wonosari, tepatnya Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, atau sekitar 30 km dari kota Yogyakarta. Sejarah topeng berasal dari kesenian tari topeng pada tahun 60-an. Dahulu, topeng kayu digunakan sebagai bagian dari kostum penari yang mewakili karakter pemainnya.

"Topeng batik baru ada pada tahun 90-an, atau pada generasi ketiga saya ini. Inovasi topeng batik ini sebenarnya dulu belajar dari seorang pelanggan yang membeli topeng kami untuk dibatik," ujar Slamet Riyadi, pemilik rumah produksi topeng batik Bina Karya.

Jika pada umumnya batik dilukis diatas kain, topeng batik ini menggunakan media kayu sebagai bahan dasar yang menambah nilai seninya. Berbeda dengan topeng pada umumnya, topeng batik tidak menggambarkan karakter seorang tokoh, tetapi lebih pada keindahan motif batik yang menjadi dasar pewarnaan. Pembatikan pun tak berbeda dengan pembuatan batik kain. Pada permukaan topeng dibuat sketsa, lalu dibatik dengan malam membentuk motif yang diinginkan. Topeng tersebut lantas *dilorot* (direbus untuk melarutkan malam,***-Red***) sehingga motif batik muncul.

Bentuk topeng batik sangat khas karena menyerupai penggambaran wajah karakter wayang. Corak batik yang berwarna cokelat teduh dan dilukiskan di atas kayu, menjadi ciri khas seninya. Topeng kayu batik buatan Desa Bobung dimanfaatkan untuk hiasan interior ruangan. Ukuran topeng pun bervariasi, mulai dari segenggaman tangan, hingga topeng besar ukuran jumbo. Peminat produk kerajinan topeng batik pun tidak hanya dari kalangan domestik, tapi juga menembus pasar mancanegara, seperti Rusia dan Amerika.

Regenerasi perajin

Menjadi perajin topeng batik sudah menjadi pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat di Desa Bobung. Uniknya, para pemuda yang menekuni bidang ini ternyata tidak memiliki latar belakang ahli seni kriya. Kemampuan tersebut merupakan bakat alami yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi para perajin otodidak ini, tidak perlu waktu lama untuk bisa menghasilkan kerajinan yang bagus.

Sebagai rumah produksi kerajinan, pemilik Bina Karya mengaku memiliki keinginan khusus kepada para perajinnya. "Saya punya keinginan, orang-orang yang sudah ikut saya bekerja di sini dan mendapat ilmu dari saya dapat mulai mandiri untuk meneruskan kerajinan yang sudah dilakukan secara turun temurun ini," ungkap Slamet.

Jika dihitung, pendapatan para perajin topeng batik bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat keramaian musim wisata. "Kalau musim *gini* ya sepi, mas.Palingan dapat 9 juta. Tapi kalau musim ramai ya terkadang bisa 15 juta," kata Slamet.

Widiyanto, seorang perajin topeng batik lainnya, juga berharap agar usaha kerajinan topeng batik ini makin lancar dan bisa terus berkembang lagi. "Harapannya, sebagai tenaga kerja, pasaran produk dari Desa Wisata Bobung bisa lancar, sehingga secara tidak langsung upah buruh seperti kami bisa meningkat," tuturnya.

Senada dengan Widiyanto, Slamet juga berharap, selain dapat menjaga kelestarian budaya, kerajinan topeng batik ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan para perajin.

Fingerprint Segera Menyapa Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya

Oleh: Dimas Pratama, Rahma Ayuningtyas/ Fiahsani Taqwim

Foto : Zaki/ Bul

Terhitung mulai semester genap 2015/2016 ini, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) mencoba menerapkan sistem *fingerprint* untuk mendata presensi mahasiswanya. Perekaman sidik jari pun sudah dilakukan sejak awal Februari 2016.

Kendati demikian, sistem presensi di FIB belum sepenuhnya menggunakan *fingerprint*. Sejauh ini alat *fingerprint* baru terpasang di 29 dari 40 ruang kelas yang digunakan. "Mungkin program ini bisa terlaksana dengan baik pada semester depan, dan kami sekarang masih dalam pendampingan pihak tendem (mitra,***-Red***)," kata Triyanto yang menjabat sebagai Kasie Akademik dan Kemahasiswaan FIB. "Jikalau nanti ada yang perlu dievaluasi, mereka (pihak tendem,***-Red***) akan memperbaiki lagi," tambahnya.

Namun, fasilitas *fingerprint* ini baru bisa dinikmati mahasiswa S1 saja. Wahid, staff Akademik dan Kemahasiswaan FIB, berkata, "Kalau untuk S2 nantinya akan menggunakan *fingerprint* juga, tetapi mungkin tidak sesegera S1. Dan untuk S3 kemungkinan tidak karena S3 kan program mandiri."

Keberadaan sistem presensi fingerprint direspon positif oleh Ayu Merlita Sari, mahasiswa S2 linguistik. Ayu berpendapat bahwa, sistem *fingerprint* sangat bagus untuk melatih kedisiplinan dan kejujuran para mahasiswa. Bagi Ayu, *fingerprint* akan mempermudah sistem absensi, serta mencegah terjadinya kebiasaan "titip absen" yang sering dilakukan mahasiswa. Sementara bagi Nurul Miftahul Jannah (Sastra Prancis '14), adanya *fingerprint* tidak berarti banyak bagi mahasiswa. "*Fingerprint* hanya akan membantu pihak dosen atau fakultas untuk memantau presensi mahasiswanya," ungkap Nurul.

http://goo.gl/qluycc

FOLLOW US!

 www.bulaksumurugm.com
 SKM UGM Bulaksumur
 @skmugmbul

Kunjungi juga website resmi Kami di bulaksumurugm.com

VISIT US